

**ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN
DIPANDANG DARI SEGI GENDER DAN TINGKAT PENDIDIKAN
(STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA AKUNTANSI
DI KOTA PADANG)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*



**Oleh:
MUHAMMAD TAUFIK AKBAR
NIM. 98667/ 2009**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2013**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

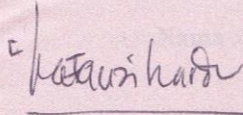
**ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DIPANDANG
DARI SEGI GENDER DAN TINGKAT PENDIDIKAN
(STUDI EMPIRIS PADA MAHASISWA AKUNTANSI DI KOTA PADANG)**

Nama : M. Taufik Akbar
NIM/BP : 98667/2009
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2013

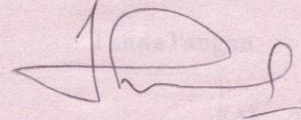
Disetujui Oleh:

Pembimbing 1



Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 20003 2 001

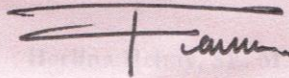
Pembimbing 2



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Mengetahui,

Ketua Prodi Akuntansi



Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

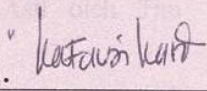
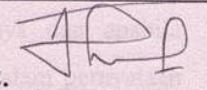
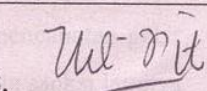
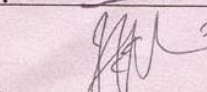
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

ANALISIS PERBEDAAN PENERAPAN ETIKA PROFESI AKUNTAN DIPANDANG DARI SEGI GENDER DAN TINGKAT PENDIDIKAN

Nama : M. Taufik Akbar
NIM/BP : 98667/2009
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, April 2013

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris : Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	2. 
3. Anggota : Nelvirita, SE, M.Si, Ak	3. 
4. Anggota : Herlina Helmy, SE, M.Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Taufik Akbar
NIM/Tahun Masuk : 98667/2009
Tempat/Tanggal Lahir : Bekasi/07 November 1988
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Keuangan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Belibis Blok D No. 7 Air Tawar Air Tawar Barat
No. Hp/Telepon : 085766162822
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Penerapan Etika Profesi Akuntan
Dipandang Dari Segi Gender Dan Tingkat Pendidikan (Studi
Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Di Kota Padang)

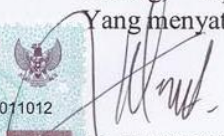
dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, April 2013

Yang menyatakan


 **M. TAUFIK AKBAR**

NIM. 98667

ABSTRAK

**M. Taufik akbar : Analisis Perbedaan Penerapan Etika Profesi Akuntan
Dipandang Dari Segi Gender Dan Tingkat Pendidikan**

**Pembimbing : 1. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak.
2. Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) Perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada situasi yang mengandung dilema-dilema etis berdasarkan gender (mahasiswa akuntansi laki-laki dengan mahasiswa akuntansi perempuan). 2) Perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada situasi yang mengandung dilema-dilema etis berdasarkan tingkat pendidikan (mahasiswa akuntansi D3 dengan mahasiswa akuntansi S1).

Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari 499 mahasiswa akuntansi pada 5 perguruan tinggi yang ada di Kota Padang. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik Independent T Test untuk menguji hipotesis dan menganalisa apakah terdapat perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada situasi yang mengandung dilema-dilema etis. berdasarkan gender dan tingkat pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika profesi akuntan ditinjau dari gender terdapat perbedaan yang signifikan. Ditinjau dari tingkat pendidikan, penerapan etika profesi akuntan juga terdapat perbedaan yang signifikan.

Dalam penelitian ini disarankan mahasiswa akuntansi hendaknya meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai kode etik akuntan, tidak hanya terbatas pada pengetahuan lewat perkuliahan di kampus, tapi juga dapat menerapkannya dalam dunia kerja yang mengandung dilema-dilema etis nantinya. Serta dapat memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan akuntansi dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Penerapan Etika Profesi Akuntan Dipandang Dari Segi Gender Dan Tingkat Pendidikan”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Eka Fauzihardani, SE, M.Si., Ak. selaku pembimbing I dan Bapak Henri Agustin, SE., M.Sc., Ak. selaku pembimbing II yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, waktu, dan masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bapak/Ibu Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi.
2. Bapak Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi.
3. Ibu Nelvirita, SE., M.Si., Ak. selaku penguji I dan Ibu Herlina Helmy, SE., M.Sak., Ak selaku penguji II yang telah meluangkan waktunya untuk menguji penulis.
4. Bapak dan Ibu Staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan.

5. Pimpinan dan Staf Perpustakaan serta staf administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah ikut membantu memberikan pelayanan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang teristimewa untuk kedua orang tua (Drs.Hamidin Muis dan Jusmi Anwar, SH) serta keluarga di Padang (Drs. MHD Husni M.Pd dan Arnis Anwar, BA) yang telah memberikan dorongan, semangat, doa serta pengorbanan materi dan non materi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman mahasiswa Program Studi Akuntansi angkatan 2009 yang sama-sama berjuang, membantu, memberikan motivasi, saran, dan informasi yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Spesial terima kasih kepada Yessy Arifman atas dukungan dan semangat yang diberikan untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam rangka penyempurnaan skripsi ini penulis mengharapkan sumbangan pikiran para pembaca berupa kritikan dan saran, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi rekan-rekan di masa yang akan datang.

Padang, Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
 BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL,DAN HIPOTESIS	
A. Kajian Teori	15
1. Etika.....	15
2. Etika Profesi Akuntan	18
3. Dilema Etis	30
4. Penugasan Audit	33
5. Penganggaran Partisipatif dan <i>Budgetary Slack</i>	40
6. Gender	44
7. Tingkat Pendidikan	47
8. Penelitian Terdahulu	49
B. Kerangka Konseptual.....	52

C. Hipotesis	55
1. Penerapan Etika Profesi dan Gender	55
2. Penerapan Etika Profesi dan Tingkat Pendidikan.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	60
B. Populasi dan Sampel	60
1. Populasi	60
2. Sampel	60
C. Jenis Data	61
D. Sumber Data.....	62
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Identifikasi Variabel Penelitian	63
1. Variabel Penelitian	63
2. Pengukuran Variabel Penelitian	63
G. Definisi Operasional Variabel.....	64
H. Instrumen Penelitian	66
I. Uji Instrumen	67
1. Uji Validitas.....	67
2. Reliabilitas.....	67
J. Teknik Analisis Data.....	68
1. Analisis Deskriptif.....	68
2. Analisis Induktif	69
a. Uji Prasyarat Analisis.....	69

1) Uji Normalitas	69
2) Uji Homogenitas Varians	70
b. Uji T	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian	72
B. Deskripsi Demografi Responden Penelitian	73
1. Berdasarkan Jenis Kelamin	73
2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
3. Berdasarkan Usia	74
4. Berdasarkan Konsentrasi Akuntansi	75
C. Deskripsi Hasil Penelitian.....	76
1. Deskripsi Variabel Penerapan Etika Profesi Akuntan	76
2. Hasil Uji Statistik Deskriptif	78
D. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian	79
1. Uji Validitas	79
2. Uji Reliabilitas	80
E. Uji Prasyarat Analisis	81
1. Uji Normalitas	81
2. Uji Homogenitas varians	82
F. Analisis Uji Beda	83
1. Uji Berdasarkan Gender	83
2. Uji Berdasarkan Tingkat Pendidikan	84
G. Pengujian Hipotesis	86

1. Hipotesis 1	86
2. Hipotesis 2	86
H. Pembahasan.....	87
1. Penerapan Etika dan Gender	87
2. Penerapan Etika dan Etika Pendidikan	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
C. Keterbatasan.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	49
Tabel 2	Pengukuran Skala Likert.....	64
Tabel 3	Indikator Variabel Penerapan Etika	66
Tabel 4	Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner Masing- Masing Universitas	72
Tabel 5	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	73
Tabel 6	Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	74
Tabel 7	Responden Berdasarkan Usia Responden	74
Tabel 8	Responden Berdasarkan Konsentrasi Akuntansi	75
Tabel 9	Distribusi Frekuensi Penerapan Etika Profesi Akuntan	76
Tabel 10	Statistik Deskriptif	79
Tabel 11	Nilai <i>Corrected Item Total Correlation</i> Terkecil	80
Tabel 12	Hasil Uji Reabilitas Data Penelitian	80
Tabel 13	Hasil Uji Normalitas Residual	82
Tabel 14	Hasil Uji Homogenitas	83
Tabel 15	<i>Group Statistics</i> Gender.....	83
Tabel 16	<i>Independent Sampels Test</i> Gender	84
Tabel 17	<i>Group Statistics</i> Tingkat Pendidikan	85
Tabel 18	<i>Independent Sampels Test</i> Tingkat Pendidikan	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kerangka Konseptual.....	54
----------	--------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	103
Lampiran 1 Kuesioner	104
Lampiran 2 Skoring Kuesioner	107
Lampiran 3 Uji Validitas dan Uji reliabilitas	119
Lampiran 4 Statistik Deskriptif	120
Lampiran 5 Hasil Uji Hipotesis	120
Lampiran 6 Uji Normalitas dan Homogenitas	121

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Etika profesi merupakan isu yang selalu menarik untuk diangkat. Tanpa adanya etika profesi, akuntansi tidak akan ada karena dengan etika maka seseorang akuntan dapat memiliki batasan-batasan tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukannya. Etika bertindak sebagai rambu-rambu (*sign*) dalam suatu kelompok masyarakat akan dapat membimbing dan mengingatkan anggotanya kepada suatu tindakan yang terpuji (*good conduct*) yang harus selalu dipatuhi dan dilaksanakan.

Menurut Conger dan Loch (2001), etika dalam situasi yang spesifik dan bersifat luas berada pada prinsip-prinsip etika dasar, yang tidak dapat secara efektif mengarahkan seluruh perilaku manusia yang menjalaninya karena ada sejumlah besar lingkungan pergaulan yang beragam di mana manusia hidup, bekerja, dan memainkan peranannya sehari-hari dan lingkungan pergaulan ini seringkali memiliki norma-norma etika yang berbeda dan dijadikan sebagai pedoman oleh seorang pengambil keputusan khususnya individu dalam sebuah situasi yang dihadapinya. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan mengenai etika, yaitu bahwa di salah satu sisi banyak orang menyatakan bahwa tidak ada standar yang benar dan absolut yang dapat diterapkan untuk semua masyarakat.

Banyak masalah yang terjadi pada berbagai kasus bisnis yang ada saat ini melibatkan profesi akuntan. Sorotan yang diberikan kepada profesi ini disebabkan

oleh faktor diantaranya praktik-praktik profesi yang mengabaikan standar akuntansi bahkan etika. Perilaku tidak etis merupakan isu yang relevan bagi profesi akuntan saat ini.

Beberapa skandal yang terjadi di dunia maupun Indonesia adalah sebagai berikut : kasus HIH Insurance dan One Tel di Australia; Enron (2001), Health South (2003), AIG (2005), Subprime Loans (2007), WorldCom dan Global Crossing di Amerika ; Parmalat di Eropa; Satyam di India (2010), kasus PT. Kimia Farma dan kasus pajak PT. Bumi Resources (2010) di Indonesia.

Dari berbagai skandal terkait etika tersebut, skandal Enron menjadi sorotan yang sangat mempengaruhi berkembangnya penelitian-penelitian mengenai arti penting etika terhadap profesi akuntansi. Kasus ini diperparah dengan praktik akuntansi yang meragukan dan tidak independennya audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Arthur Andersen terhadap Enron. Arthur Anderson, yang sebelumnya merupakan salah satu “*The big six*” tidak hanya melakukan memanipulasi laporan keuangan Enron tetapi juga telah melakukan tindakan yang tidak etis dengan menghancurkan dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan kasus Enron. Independensi sebagai auditor terpengaruh dengan banyaknya mantan pejabat dan senior KAP Arthur Andersen yang bekerja dalam department akuntansi Enron. Baik Enron maupun Anderson, dua raksasa industri di bidangnya, sama-sama kolaps dan menorehkan sejarah kelam dalam praktik akuntansi.

Di Indonesia, kasus skandal akuntansi bukanlah hal yang baru. Salah satu kasus yang ramai diberitakan adalah keterlibatan 10 KAP di Indonesia dalam

praktik kecurangan keuangan. KAP-KAP tersebut ditunjuk untuk mengaudit 37 bank sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997. Hasil audit mengungkapkan bahwa laporan keuangan bank-bank tersebut sehat. Saat krisis menerpa Indonesia, bank-bank tersebut kolaps karena kinerja keuangannya sangat buruk. Ternyata baru terungkap dalam investigasi yang dilakukan pemerintah bahwa KAP-KAP tersebut terlibat dalam praktik kecurangan akuntansi. Satu-satunya badan yang berhak untuk menjatuhkan sanksi adalah BP2AP (Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik) yaitu lembaga non-pemerintah yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Setelah melalui investigasi BP2AP menjatuhkan sanksi terhadap KAP-KAP tersebut, akan tetapi sanksi yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu BP2AP hanya melarang 3 KAP melakukan audit terhadap klien dari bank-bank, sementara 7 KAP yang lain bebas (Suryana, 2002).

Kasus pelanggaran etika lain yang melibatkan profesional akuntan juga terjadi di instansi perpajakan, yaitu kasus Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Keduanya merupakan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang merupakan tamatan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Dalam kasus Gayus, Gayus diduga menerima suap atau *success fee* dari kasus-kasus sengketa pajak yang ditanganinya. Sementara itu dalam kasus lainnya, Dhana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dengan menerima gratifikasi sebesar Rp 2 miliar dan empat lembar *Mandiri Traveller Cheque* (MTC) yang merupakan pelanggaran atas tanggung jawab sebagai pegawai pajak (Antaranews.com, 9 November 2012)

Berbagai skandal bisnis dan kecurangan akuntan tersebut, tentunya mengarahkan publik pada suatu pertanyaan tentang standar dan nilai etika dalam profesi akuntan, sebagai profesi yang menjunjung tinggi integritas, independensi, objektivitas dan kepercayaan publik. Penelitian Mangos, Lewis, dan Roffey (1997); Jakubowski et al., (2002), yang dilakukan di sejumlah negara semakin mempertegas pentingnya etika bagi profesi akuntan untuk mempertahankan posisi sebagai kepercayaan publik.

Berbagai kasus-kasus pelanggaran etika ini merupakan dasar yang cukup kuat untuk perlu adanya penerapan yang sesuai atas standar etika profesi akuntan. Standar etika profesi akuntan merupakan pendidikan aktivitas profesi, profesi akuntan tidak terlepas dari aktivitas bisnis yang menuntut mereka untuk bekerja secara profesional sehingga selain harus memahami dan menerapkan etika profesi, mereka harus memahami dan menerapkan etika di dalam lingkungan perusahaan. Karena dasar itu lah perlu bagi seorang akuntan untuk dapat mempertahankan standar etika yang berlaku dalam profesinya.

Leung dan Cooper (1995) dalam Eka (2012) menyatakan bahwa mempertahankan standar etika adalah hal fundamental bagi kredibilitas bagi profesi akuntan. Dengan menjaga kredibilitas pekerja akuntansi ini, maka di kemudian hari akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan lagi. Maka dari itu, untuk meningkatkan kredibilitas profesi akuntan diperlukan suatu standar profesi yang kemudian di kenal dengan kode etik profesi (*code of conduct*)

Kode etik profesi akuntan merupakan sebuah sarana dan bukan merupakan hukum dalam profesi akuntan. Kode etik profesi ini berfungsi sebagai standar profesi yang berguna menjaga agar profesi akuntan dapat bekerja secara profesional. Inti dari bersikap profesional adalah bertanggungjawab terhadap profesi yang diembannya (A. Nurwanah, 2008). Kode etik akuntan (*Code of Conduct*) ini diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang merupakan organisasi profesi akuntan di Indonesia. Menurut IAI, kode etik akuntansi Indonesia terdiri atas 8 prinsip, (1) Tanggung Jawab Profesi, (2) Kepentingan umum, (3) Integritas, (4) Objektivitas, (5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional, (6) Kerahasiaan, (7) Perilaku profesional, dan (8) Standar teknis.

Ketersediaan kode etik ini saja tidaklah cukup karena kode etik ini hanya akan menjadi sebatas pengetahuan apabila dalam penerapannya tidak dilaksanakan oleh para profesional akuntan. Sebagai calon akuntan, mahasiswa perlu memahami etika profesi akuntan sejak dini dan juga dituntut untuk dapat bersikap secara profesional untuk membuktikan bahwa profesi akuntan merupakan profesi yang memiliki etika tinggi dan mampu bekerja tanpa berpihak untuk kepentingan salah satu pihak saja, namun untuk semua pihak yang berkepentingan.

Dalam konteks mahasiswa, salah satu bentuk pelanggaran etika yang sering kali terjadi adalah perilaku curang seperti mencontek dan bekerjasama saat ujian. Pelanggaran semacam ini telah banyak dilakukan oleh mahasiswa di lingkungan akademik. Penelitian yang dilakukan oleh *The Center for Academic Integrity* USA (Morris dan Kilian, 2006) menyatakan bahwa lebih dari tujuh

puluh lima persen dari enam ratus mahasiswa yang disurvei di Washington DC telah melakukan berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan yang dilakukan adalah mencontek pada saat ujian serta *copy paste* pekerjaan teman. Berita-berita tentang tertangkapnya pelaku ketidakjujuran dalam akademik pun biasanya marak menjelang akhir tahun pelajaran atau ketika musim ujian tiba. Upaya-upaya kerja sama yang semestinya tidak terjadi pun ikut menodai citra dunia pendidikan. Hal seperti ini juga telah acap kali terjadi di Universitas Negeri Padang.

Kecurangan atau kejadian tidak etis ini sudah menjadi bagian dari budaya pada beberapa perguruan tinggi (Kleiner dan Lord, 1999). Budaya tidak etis di lingkungan mahasiswa terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan, pemahaman serta kemauan untuk menerapkan nilai-nilai moral yang sudah mereka dapatkan dari keluarga maupun pendidikan formal di kampus. Mahasiswa akuntansi yang akan dipersiapkan menjadi seorang akuntan seharusnya lebih memiliki sensitivitas etis atau kemampuan untuk dapat mengerti dan peka serta mengetahui permasalahan etika yang terjadi (Shaub *et al.*, 1993). Kepekaan mahasiswa terhadap perilaku etis atau tidak etis mutlak harus dimiliki. Mengingat kepekaan seorang mahasiswa atau calon akuntan terhadap permasalahan etis merupakan landasan pijak bagi praktek akuntan (Ponemon dan Gabhart, 1993).

Perilaku mencontek ini merupakan bukti yang memperlihatkan kepada kita bahwa pentingnya penerapan etika bagi mahasiswa. Menurut Nonis dan Smith (2001) dalam Adi (2007), mencontek di perguruan tinggi berkorelasi positif dengan perilaku tidak etis di tempat kerja. Fenomena ini menunjukkan betapa pemahaman etika mahasiswa dalam penerapannya masih rendah. Ketidakpatuhan

pada etika yang berlaku tentunya akan merugikan mahasiswa sendiri setelah mereka menamatkan pendidikannya di kampus.

Menurut Dupont dan Craig (1996) dalam Eka (2012) menyatakan bahwa pemahaman etika yang ditunjukkan oleh mahasiswa perguruan tinggi akan membentuk dasar perilaku etis masa depan seorang profesional dan manajer. Maka dari itu, mahasiswa yang dalam beberapa tahun kedepan akan menjadi seorang pekerja akuntansi, harus memiliki penalaran etika (*ethical reasoning*) yang baik agar mampu berperilaku etis dalam dunia kerja nantinya.

Pembelajaran etika akuntan baru dapat dikatakan efektif jika mahasiswa akuntansi mampu berperilaku etis dalam berbagai situasi dilema etis yang dihadapinya. Situasi dan kondisi di dunia kerja yang akan dihadapi para calon lulusan akuntansi ini tidak lepas dari kondisi yang terkait dilema etis. Menurut Arens *et al.*, (2006) Dilema etis adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Situasi dilema etis dapat terjadi dalam berbagai kasus pekerjaan akuntan, antara lain penugasan audit dan penyusunan anggaran partisipatif yang memungkinkan terjadinya kesenjangan anggaran. Adanya dilema etis ini membuat seorang akuntan menghadapi situasi konflik untuk memilih berbagai pilihan yang paling etis.

Pendidikan akuntansi seharusnya membantu para peserta didik untuk memenuhi tantangan ini dengan membuat mahasiswa menjadi lebih siap dalam menghadapi dilema etis dalam dunia kerja. Mahasiswa akuntansi sudah seharusnya diperkenalkan dan dilatih agar mampu merasakan peran pentingnya

etika dalam kehidupan profesional mendatang dan mampu mengembangkan perspektif kritis terhadap isu-isu etis yang sedang berkembang.

Maka dari itu, dengan adanya pembelajaran etika yang diberikan secara tepat, lambat laun juga akan meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang bagaimana pengetahuan etika ini diterapkan. Dengan meningkatnya kesadaran etika ini, maka diharapkan secara tidak langsung akan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan karena meningkatnya kualitas kerja profesi akuntan dimasa yang akan datang. Dari bukti-bukti ini, sangatlah beralasan apabila pendidikan tinggi akuntansi merespon dengan berusaha memasukkan atau mengintegrasikan etika dalam kurikulum. Shaub *et al.*,(2003) menekankan pentingnya peran pendidikan etika yang dapat meningkatkan kesadaran etika.

Menurut Eka (2012), Kurikulum yang ada sekarang di perguruan tinggi lebih cenderung berfokus untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki kemampuan teknis akuntansi, yang bersifat kuantitatif, dan kurang memberikan perhatian pada bagaimana perilaku etis diterapkan dalam situasi pekerjaan yang akan dihadapi oleh lulusan akuntansi. Selain itu, Rustiana (2006) mengutip pernyataan Russell dan Smith (2003) yang menyoroti bahwa kegagalan bisnis yang melibatkan salah satu kantor akuntan publik global, tidak terlepas dari desain kurikulum pendidikan tinggi akuntansi yang dirasa belum mampu menyediakan materi yang cukup untuk mempersiapkan mahasiswa akuntansi sebagai calon-calon akuntan dalam memasuki dunia bisnis. Hal ini menunjukkan para pendidik akuntansi dan praktisi pun tidak mampu mengembangkan konsep-konsep etika yang sesuai dengan keadaan dunia bisnis yang sedang berlangsung.

Mencermati dari hal di atas, untuk itu dalam studi ini dilakukan untuk melihat seberapa baik tingkat penerapan etika profesi akuntan pada mahasiswa dalam situasi pekerjaan yang akan dihadapi oleh lulusan akuntansi. Pekerjaan yang mengandung dilema etika dalam penelitian ini terdapat dalam penyusunan anggaran dan penugasan audit. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti perbedaan penerapan etika profesi ditinjau dari variabel demografi berupa gender dan tingkat pendidikan.

Penelitian yang berkaitan dengan isu gender dalam etika akuntan sudah banyak dilakukan. Menurut Stanga dan Turpen (1991), mempelajari masalah gender dalam konteks akuntansi adalah penting untuk tiga alasan. Pertama, hal itu akan menambah hal penting ke literatur tentang teori konflik dan temuan empiris yang ada saat ini. Kedua, mungkin menunjukkan di mana sumber daya untuk pendidikan etika harus lebih ditekankan. Akhirnya, hal itu dapat memberikan wawasan tren masa depan dalam etika profesi akuntan sebagai asumsi bahwa perempuan terus mengambil peran yang lebih penting.

Dilema etis yang dihadapi antara pria dan wanita memiliki perbedaan. Penelitian yang dilakukan Peterson *et al.*, (2001) dalam Komala dan Arnold (2010), perempuan cenderung memandang dilema etis berdasarkan pengertian, tanggung jawab, dan perhatian pada orang lain sementara laki-laki cenderung memandangnya berdasarkan aturan-aturan, hak, *fairness*, dan *justice*. Hal ini memperlihatkan bahwa pandangan etis antara laki-laki dan perempuan berbeda. Oleh karena itu, isu gender ini perlu diteliti untuk melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dalam memandang suatu dilema etis dan pengambilan keputusan etis

dalam menghadapi dilema itu. Pemilihan variabel gender dipilih karena peran profesional perempuan dalam dunia profesi saat ini makin meningkat dan bahwa perempuan lebih tidak toleran terhadap perilaku tidak etis.

Nilai-nilai etika dalam profesi akuntan telah secara jelas tercantum dalam bentuk standar perilaku profesional (*codes of professional conduct*), dan telah dipelajari oleh mahasiswa baik yang menempuh jenjang ahli madya (D3) dan sarjana (S1). Artinya, profesional akuntansi telah dibekali dengan pengetahuan tentang etika profesi akuntan. Namun setelah bekerja, para lulusan akuntansi ini gagal menerapkan pengetahuan etika akuntan mereka khususnya dalam kondisi yang mengandung dilema etika. Maka dari itu, peneliti memasukkan variabel tingkat pendidikan untuk melihat bagaimana etika profesi ini diterapkan pada mahasiswa akuntansi dimulai dari jenjang D3 dan S1.

Penelitian mengenai penerapan etika profesi akuntan dilakukan oleh Utami (2009) yang meneliti perbedaan penerapan etika antara auditor junior dan auditor senior di Kota Malang. Hasil penelitian mengindikasikan penerapan delapan pernyataan etika profesi yaitu tanggung jawab profesi, kepentingan umum, integritas, obyektivitas, kompetensi dan kehati-hatian, kerahasiaan, perilaku profesional dan standar teknis pada unsur perilaku individu tidak terdapat perbedaan penerapan etika oleh auditor junior dan auditor senior dalam menjalankan pekerjaannya.

Darsinah (2005) menguji perbedaan sensitifitas etis ditinjau dari *gender* dan disiplin ilmu pada mahasiswa akuntansi, mahasiswa manajemen dan mahasiswa pendidikan akuntansi. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa secara

keseluruhan mahasiswa perempuan mempunyai sensitivitas etis lebih tinggi daripada mahasiswa laki-laki. Dilihat dari disiplin ilmu, secara terperinci diketahui bahwa antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa pendidikan akuntansi tidak terdapat perbedaan sensitivitas etis yang signifikan, begitu juga antara mahasiswa akuntansi dengan mahasiswa manajemen. Tetapi terdapat perbedaan sensitivitas etis yang signifikan antara mahasiswa manajemen dengan mahasiswa pendidikan akuntansi.

Putri (2005) meneliti perbedaan perilaku etis auditor dalam etika profesi akuntan dilihat dari *Locus of Control*, *gender*, pengalaman kerja, dan *equity sensivity*. Hasilnya, secara statistik auditor *internal locus of control* cenderung berperilaku lebih etis daripada auditor *external locus of control*. Terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor senior dan auditor junior. Secara statistik, auditor junior cenderung berperilaku lebih etis daripada auditor senior. Tidak terdapat perbedaan perilaku etis yang signifikan antara auditor pria dan auditor wanita. Secara statistik, *gender* tidak menyebabkan perbedaan perilaku etis yang signifikan.

Renata (2005) melakukan penelitian tentang Pengaruh *Locus of Control*, Tingkat Pendidikan, Pengalaman Kerja, dan Pertimbangan Etis terhadap Perilaku Auditor dalam Situasi Konflik Audit. Hasilnya, terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit dimana hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang signifikan. Hasil penelitian Renata juga sejalan dengan penelitian Widi (2010) yang menunjukkan hasil yang sama. Hasil penelitian lain mengenai tingkat pendidikan juga dilakukan oleh Mustika (2007)

menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa interaksi antara tingkat pendidikan dengan pertimbangan etis tidak berpengaruh secara signifikan dengan respon auditor terhadap tekanan auditee dalam situasi konflik audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Eka (2012) yang merupakan staf pengajar Universitas Negeri Padang tentang perbedaan pengetahuan dan penerapan etika profesi akuntan pada Mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Padang, menunjukkan hasil bahwa mahasiswa akuntansi hanya menilai etika profesi akuntan sebagai pengetahuan saja, namun dalam penerapan etika yang mengandung situasi dilema etis masih kurang bisa berperilaku etis.

Penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian yang dilakukan oleh Eka (2012). Penelitian tersebut hanya mencakup sampel pada satu universitas di Kota Padang saja. Pada penelitian ini, sampelnya diperluas yang terdiri atas dua universitas negeri dan tiga kampus swasta di Kota Padang. Hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan perilaku etis mahasiswa akuntansi membutuhkan perhatian yang khusus. Hal ini karena kedepannya, para lulusan akuntansilah yang akan memegang peran penting dalam memperbaiki atau memperbarui kepercayaan publik terhadap profesi akuntan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti merasa perlu untuk meneliti penerapan etika profesi akuntan ini yang di beri judul **“Analisis Perbedaan Penerapan Etika Profesi Akuntan Dipandang Dari Segi Gender Dan Tingkat Pendidikan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Akuntansi Di Kota Padang)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka permasalahan pokok yang diajukan untuk penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan penerapan etika menurut gender?
2. Apakah terdapat perbedaan penerapan etika menurut tingkat pendidikan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika dalam situasi yang mengandung dilema etika dilihat dari gender
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan etika dalam situasi yang mengandung dilema etika dilihat dari tingkat pendidikan

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat bagi penulis dalam memahami dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari Universitas. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai penerapan etika.
- b. Memberikan pengetahuan empiris mengenai perbandingan antara penerapan etika dilihat dari gender dan tingkat pendidikan
- c. Memberikan masukan bagi perguruan tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengenai pentingnya penerapan etika harus diberikan kepada mahasiswa sehingga

setelah lulus nanti mereka bisa bekerja secara profesional berdasarkan etika profesi dan dapat menerapkan etika dalam lingkungan bisnis.

- d. Memberikan informasi kepada kalangan akademis mengenai penerapan etika untuk dijadikan dasar penyusunan kurikulum akuntansi.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Etika

Etika dalam bahasa latin adalah *ethica*, yang berarti falsafah moral. Dari asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti adat istiadat/ kebiasaan yang baik. Etika merupakan pedoman cara bertingkah laku yang baik dari sudut pandang budaya, susila serta agama. Keraf (1998) menyatakan bahwa etika secara harfiah berasal dari kata Yunani, *ethos* (jamaknya *ta etha*) yang artinya sama dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Istilah etika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) memiliki tiga arti, yang salah satunya adalah nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Bartens (2000), merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian:

1. Etika digunakan dalam pengertian nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral atau kode etik.
3. Etika merupakan ilmu yang mempelajari tentang suatu hal yang baik dan buruk.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa etika merupakan seperangkat aturan/ norma/ pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan oleh sekelompok/ golongan

manusia/ masyarakat/ profesi. Menurut Beny (2008), etika memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan pelbagai moralitas yang membingungkan.
2. Etika ingin menampilkan ketrampilan intelektual yaitu ketrampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis.
3. Orientasi etis ini diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme

Fungsi etika diatas, dapat dilihat bahwa etika sangat berperan penting agar manusia dapat menggunakan intelektual mereka untuk kebaikan dan tidak melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan. Menurut Keraf dan Imam (1995), etika dapat dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Etika umum.

Etika umum berkaitan dengan bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak, serta tolok ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori.

2. Etika khusus.

Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Etika individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri.
- b. Etika sosial, berkaitan dengan kewajiban sikap dan pola perilaku manusia dengan lainnya salah satu bagian dari etika sosial adalah etika profesi, termasuk etika akuntan. Etika sosial dibagi menjadi (Beny, 2008):
 - a) Sikap terhadap sesama;
 - b) Etika keluarga
 - c) Etika profesi misalnya etika untuk pustakawan, arsiparis, dokumentalis, pialang informasi
 - d) Etika politik
 - e) Etika lingkungan hidupserta
 - f) Kritik ideologi Etika adalah filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang ajaran moral sedangkan moral adalah ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya. Etika selalu dikaitkan dengan moral serta harus dipahami perbedaan antara etika dengan moralitas.

Etika memang tidak bisa dipisahkan dari pengetahuan moral. Tindakan yang sesuai etika secara moral dianggap baik; sementara tindakan yang menyimpang dari etika secara moral dianggap buruk. Etika sebagai ilmu yang menyediakan tingkat laku moral dapat dibagi melalui tiga pendekatan, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan metaetika (Bartens, 2002). Etika deskriptif melukiskan tingkah laku moral dalam arti luas, mempelajari moralitas yang terdapat pada individu-

individu tertentu, dan tidak memberikan penilaian. Etika deskriptif hanya melukiskan, tidak memberikan penilaian atas tingkah laku moral. Etika normatif tidak mendeskripsikan tingkah laku manusia, tetapi sudah memberikan penilaian tingkah laku manusia. Dengan demikian sifatnya bukan deskriptif, melainkan perskriptif atau memerintahkan, menentukan benar atau tidak tingkah laku. Metaetika mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Sebagai contoh ‘baik’ dalam suatu kalimat dapat mempunyai makna berbeda dalam konteks susunan kalimat yang berbeda.

2. Etika Profesi Akuntan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi merupakan kata benda yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. Dilihat dari asal katanya, profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “*Profess*”, yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen. Sementara itu menurut Isnanto (2009), profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa profesi memiliki arti sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan keahlian terhadap suatu pengetahuan dan keahlian khusus yang dapat memberikan penghidupan bagi pemiliknya.

Walaupun secara bahasa profesi dapat berarti pekerjaan, namun profesi memiliki karakteristik yang membedakannya Robert W. Richey dalam bukunya

“*Preparing for a Career in Education*”, yang dikutip M. Yunus (2006) mengemukakan ciri-ciri sekaligus syarat-syarat dari suatu profesi sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan pelayanan kemanusiaan yang ideal dibandingkan dengan kepentingan pribadi.
2. Seorang pekerja profesional, secara relatif memerlukan waktu yang panjang untuk mempelajari konsep-konsep serta prinsip-prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya.
3. Memiliki kualifikasi tertentu untuk memasuki profesi tersebut serta mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan.
4. Memiliki kode etik yang mengatur keanggotaan, tingkah laku, sikap dan cara kerja.
5. Membutuhkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi.
6. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya.
7. Memberikan kesempatan untuk kemajuan, spesialisasi dan kemandirian,
8. Memandang profesi sebagai suatu karier hidup (*a live career*) dan menjadi seorang anggota yang permanen.

Dari karakteristik diatas, dapat dilihat perbedaan antara pekerjaan yang merupakan profesi dan yang bukan. Akuntan merupakan salah satu dari profesi. Hal ini sejalan menurut Munawir (2005), akuntan disebut sebagai suatu profesi karena telah memenuhi lima prinsip karakteristik suatu profesi yaitu pengetahuan khusus yang diperoleh melalui pendidikan formal, memiliki standar

kualitatif profesi, status profesinya diakui oleh masyarakat, memiliki etik dan adanya organisasi nasional yang ditunjuk untuk meningkatkan tanggung jawab sosialnya.

Salah satu karakteristik profesi ini adalah etika. Etika mengenai profesi akuntan tercantum dalam Kode etik Akuntan (*Code of Conduct*). Di Indonesia sendiri, kode etik akuntan Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik akuntan Indonesia menurut IAI terdiri atas 3 bagian, yaitu (1) Prinsip Etika, disahkan oleh Konggres, (2) Aturan Etika, disahkan oleh Rapat Anggota Himpunan, dan (3) Interpretasi Aturan Etika, dibentuk oleh Himpunan. Pada bagian pertama, Prinsip Etika Profesi dalam Kode Etik Ikatan Akuntan Indonesia menyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya kepada publik, pemakai jasa akuntan, dan rekan yang terdiri atas delapan prinsip, yaitu :

1. Prinsip Pertama - Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

a. Sebagai profesional, anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat.

Sejalan dengan peranan tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Anggota juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntan, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung-jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri.

Usaha kolektif semua anggota diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan tradisi profesi.

2. Prinsip Kedua - Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

a. Satu ciri utama dari suatu profesi adalah penerimaan tanggung-jawab kepada publik. Profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lainnya bergantung kepada obyektivitas dan integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis secara tertib. Ketergantungan ini menimbulkan tanggung-jawab akuntan terhadap kepentingan publik. Kepentingan publik didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Ketergantungan ini menyebabkan sikap dan tingkah laku akuntan dalam menyediakan jasanya mempengaruhi kesejahteraan ekonomi masyarakat dan negara.

b. Profesi akuntan dapat tetap berada pada posisi yang penting ini hanya dengan terus menerus memberikan jasa yang unik ini pada tingkat yang menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dipegang teguh. Kepentingan utama profesi akuntan adalah untuk membuat pemakai jasa akuntan paham bahwa jasa akuntan dilakukan dengan tingkat prestasi

tertinggi dan sesuai dengan persyaratan etika yang diperlukan untuk mencapai tingkat prestasi tersebut.

- c. Dalam memenuhi tanggung-jawab profesionalnya, anggota mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas, dengan suatu keyakinan bahwa apabila anggota memenuhi kewajibannya kepada publik, maka kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
- d. Mereka yang memperoleh pelayanan dari anggota mengharapkan anggota untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan integritas, obyektivitas, keseksamaan profesional, dan kepentingan untuk melayani publik. Anggota diharapkan untuk memberikan jasa berkualitas, mengenakan imbalan jasa yang pantas, serta menawarkan berbagai jasa, semuanya dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang konsisten dengan prinsip etika profesi ini.
- e. Semua anggota mengikat dirinya untuk menghormati kepercayaan publik. Atas kepercayaan yang diberikan publik kepadanya, anggota harus secara terus-menerus menunjukkan dedikasi mereka untuk mencapai profesionalisme yang tinggi.
- f. Tanggung-jawab seorang akuntan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan klien individual atau pemberi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang akuntan harus mengikuti standar profesi yang dititik-beratkan pada kepentingan publik

3. Prinsip Ketiga – Integritas

Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin.

- a. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan (*benchmark*) bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- b. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk, antara lain, bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- c. Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan lakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk menaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.

- d. Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip obyektivitas dan kehati-hatian profesional.

4. Prinsip Keempat – Obyektivitas

Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya.

- a. Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.
- b. Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi. Anggota dalam praktik publik memberikan jasa attestasi, perpajakan, serta konsultasi manajemen. Anggota yang lain menyiapkan laporan keuangan sebagai seorang bawahan, melakukan jasa audit internal dan bekerja dalam kapasitas keuangan dan manajemennya di industri, pendidikan dan pemerintahan. Mereka juga mendidik dan melatih orang-orang yang ingin masuk ke dalam profesi. Apapun jasa atau kapasitasnya, anggota harus melindungi integritas pekerjaannya dan memelihara obyektivitas.
- c. Dalam menghadapi situasi dan praktik yang secara spesifik berhubungan dengan aturan etika sehubungan dengan obyektivitas, pertimbangan yang cukup harus diberikan terhadap faktor-faktor berikut:

- c.1 Adakalanya anggota dihadapkan kepada situasi yang memungkinkan mereka menerima tekanan-tekanan yang diberikan kepadanya. Tekanan ini dapat mengganggu obyektivitasnya.
- c.2 Adalah tidak praktis untuk menyatakan dan menggambarkan semua situasi di mana tekanan-tekanan ini mungkin terjadi. Ukuran kewajaran (*reasonableness*) harus digunakan dalam menentukan standar untuk mengidentifikasi hubungan yang mungkin atau kelihatan dapat merusak obyektivitas anggota.
- c.3 Hubungan-hubungan yang memungkinkan prasangka, bias atau pengaruh lainnya untuk melanggar obyektivitas harus dihindari.
- c.4 Anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pemberian jasa profesional mematuhi prinsip obyektivitas.
- c.5 Anggota tidak boleh menerima atau menawarkan hadiah atau *entertainment* yang dipercaya dapat menimbulkan pengaruh yang tidak pantas terhadap pertimbangan profesional mereka atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengan mereka. Anggota harus menghindari situasi-situasi yang dapat membuat posisi profesional mereka ternoda.

5. Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat

yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

- a. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan kompetensi dan ketekunan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya, demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung-jawab profesi kepada publik.
- b. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogyanya tidak menggambarkan dirinya memiliki keahlian atau pengalaman yang tidak mereka punyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung-jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti disyaratkan oleh Prinsip Etika.
- c. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang anggota untuk memberikan jasa dengan kemudahan dan kecerdikan. Dalam hal penugasan profesional melebihi kompetensi anggota atau perusahaan, anggota wajib melakukan konsultasi atau menyerahkan klien kepada pihak lain yang lebih kompeten. Setiap anggota bertanggung-jawab untuk menentukan kompetensi masing-masing atau menilai apakah

pendidikan, pengalaman dan pertimbangan yang diperlukan memadai untuk tanggung-jawab yang harus dipenuhinya.

- d. Anggota harus tekun dalam memenuhi tanggung-jawabnya kepada penerima jasa dan publik. Ketekunan mengandung arti pemenuhan tanggung-jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku.
- e. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung-jawabnya.

6. Prinsip Keenam – Kerahasiaan

Setiap anggota harus, menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya

- a. Anggota mempunyai kewajiban untuk menghormati kerahasiaan informasi tentang klien atau pemberi kerja yang diperoleh melalui jasa profesional yang diberikannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota dan klien atau pemberi kerja berakhir.
- b. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk mengungkapkan informasi.

- c. Anggota mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa staf di bawah pengawasannya dan orang-orang yang diminta nasihat dan bantuannya menghormati prinsip kerahasiaan.
- d. Kerahasiaan tidaklah semata-mata masalah pengungkapan informasi. Kerahasiaan juga mengharuskan anggota yang memperoleh informasi selama melakukan jasa profesional tidak menggunakan atau terlihat menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi atau keuntungan pihak ketiga.
- e. Anggota yang mempunyai akses terhadap informasi rahasia tentang penerima jasa tidak boleh mengungkapkannya ke publik. Karena itu, anggota tidak boleh membuat pengungkapan yang tidak disetujui (*unauthorized disclosure*) kepada orang lain. Hal ini tidak berlaku untuk pengungkapan informasi dengan tujuan memenuhi tanggung-jawab anggota berdasarkan standar profesional.
- f. Kepentingan umum dan profesi menuntut bahwa standar profesi yang berhubungan dengan kerahasiaan didefinisikan dan bahwa terdapat panduan mengenai sifat dan luas kewajiban kerahasiaan serta mengenai berbagai keadaan di mana informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dapat atau perlu diungkapkan.
- g. Berikut ini adalah contoh hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sejauh mana informasi rahasia dapat diungkapkan.

g.1 Apabila pengungkapan diizinkan. Jika persetujuan untuk mengungkapkan diberikan oleh penerima jasa, kepentingan semua pihak termasuk pihak ketiga yang kepentingannya dapat terpengaruh harus dipertimbangkan.

g.2 Pengungkapan diharuskan oleh hukum. Beberapa contoh di mana anggota diharuskan oleh hukum untuk mengungkapkan informasi rahasia adalah: untuk menghasilkan dokumen atau memberikan bukti dalam proses hukum; dan untuk mengungkapkan adanya pelanggaran hukum kepada publik.

g.3 Ketika ada kewajiban atau hak profesional untuk mengungkapkan: untuk mematuhi standar teknis dan aturan etika; pengungkapan seperti itu tidak bertentangan dengan prinsip etika ini; untuk melindungi kepentingan profesional anggota dalam sidang pengadilan; untuk menaati penelaahan mutu (atau penelaahan sejawat) IAI atau badan profesionallainnya; dan untuk menanggapi permintaan atau investigasi oleh IAI atau badan pengatur.

7. Prinsip Ketujuh - Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi:

a. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung-

jawabnya kepada penerima jasa, pihak ketiga, anggota yang lain, staf, pemberi kerja dan masyarakat umum.

8. Prinsip Kedelapan - Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.

- a. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, *International Federation of Accountants*, badan pengatur, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

3. Dilema Etis

Charles Zastrow, *et al* (2009) mendefinisikan dilema etika sebagai sebuah konflik prinsip yang terjadi ketika dua atau lebih prinsip etika saling bertentangan satu sama lain, dan ini menyulitkan untuk membuat keputusan yang dapat memberikan kepuasan bagi pihak-pihak yang terkait. Hal senada dikemukakan oleh Rae (2009), bahwa dilema etis adalah konflik kepentingan antara dua nilai atau lebih atau keuntungan yang digerakkan oleh kebijakan (*virtue driven interest*). Sementara itu, Arens *et al.*, (2006) menyatakan dilema etis adalah situasi yang dihadapi seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Dari tiga pengertian di atas, dilema etis merupakan suatu

situasi dimana seseorang di paksa untuk membuat keputusan yang paling tepat diantara berbagai kepentingan yang ada.

Setiap profesi memiliki dilema etisnya masing-masing, begitu pula profesi akuntansi. Pekerjaan akuntansi memiliki tugas-tugas berupa : (1) penyusunan sistem akuntansi; (2) penyusunan laporan akuntansi kepada pihak-pihak diluar perusahaan; (3) penyusunan laporan akuntansi kepada manajemen; (4) penyusunan anggaran; (5) menangani masalah perpajakan; dan (6) melakukan pemeriksaan intern (Soemarso, 2004). Dalam melaksanakan tiap-tiap pekerjaan ini seorang akuntan akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mana harus diutamakan untuk dilaksanakan. Dia harus memilih bagaimana seharusnya mempertahankan moralnya sebagai seorang profesional (Akuntan) dan memenuhi keinginan klien, yang satu pihak merupakan sumber dari penghasilan yang didapatnya dari praktik keprofesionalannya (Nurwanah : 2008).

Untuk lebih memahami apa itu dilema etis, perlu dipahami pula mengenai mengapa seseorang melakukan tindakan yang tidak etis. Berikut adalah metode-metode rasionalisasi yang sering digunakan, yang dengan mudah mengakibatkan tindakan tidak etis (Arens *et al.*, 2006) :

1. Setiap orang melakukannya

Memalsukan SPT pajak, mencontek saat ujian, atau menjual produk yang cacat merupakan perilaku yang dapat diterima umumnya didasarkan pada rasionalisasi bahwa setiap orang lain juga melakukan hal yang sama dan karena itu merupakan perilaku yang dapat diterima.

2. Jika sah menurut hukum, hal itu etis

Menggunakan argumen bahwa semua perilaku yang sah menurut hukum adalah perilaku etis sangat bergantung pada kesempurnaan hukum.

3. Kemungkinan penemuan dan konsekuensinya

Filosofi ini bergantung pada evaluasi atas kemungkinan bahwa orang lain akan menemukan perilaku tersebut. Biasanya, orang itu juga akan menilai besarnya kerugian (konsekuensi) yang akan diterimanya bila hal itu terbongkar

Dengan mengetahui alasan mengapa orang melakukan tindakan tidak etis ini, dapat diambil kesimpulan bahwa dilema etis disebabkan oleh hal-hal diatas. Untuk menghindari dilema etika ini ada sesuatu pendekatan yang dapat digunakan sebagai pegangan untuk memecahkan dilema etika. Ada enam langkah yang dapat digunakan dalam menghindari dilema etika (Arens *et al.*, 2006) yaitu :

1. Mendapatkan fakta-fakta yang relevan.
2. Menentukan isu-isu etika dari fakta-fakta.
3. Menentukan sikap dan bagaimana orang atau kelompok yang dipengaruhi dilema tersebut.
4. Menentukan alternatif yang tersedia dalam memecahkan dilema.
5. Menentukan konsekuensi yang mungkin dari setiap alternatif.
6. Menetapkan tindakan yang tepat.

Langkah-langkah ini bertujuan akhir untuk membantu akuntan dalam mengambil keputusan yang paling tepat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai keputusan yang paling etis. Walaupun pada akhirnya keputusan yang

diambil oleh seorang profesi akuntan tidak dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap keputusan akuntan.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menganalisis penerapan etika pada berbagai pekerjaan akuntan seperti penugasan audit dan penyusunan anggaran.

4. Penugasan Audit

Untuk lebih memahami mengenai etika dalam penugasan audit, seorang auditor perlu diberikan pemahaman mengenai standar audit yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sebagai berikut :

Standar umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

Standar pekerjaan lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.

3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

Standar pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Kesepuluh standar ini merupakan pedoman kerja yang paling utama bagi para auditor (Nurwanah, 2008). Arens *et al.*, (2006) menjelaskan dalam mengembangkan suatu rencana kerja audit secara keseluruhan, auditor

menggunakan lima jenis pengujian untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar sebagai berikut :

1. Prosedur penilaian risiko

Standar pekerjaan lapangan yang kedua mengharuskan auditor memahami entitas dan lingkungan internalnya, untuk memahami entitas dan lingkungannya, untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan klien.

2. Pengujian pengendalian

Pemahaman auditor atas pengendalian internal digunakan untuk menilai risiko pengendalian bagi setiap tujuan audit yang terkait dengan transaksi.

3. Pengujian substansit atas transaksi

Untuk memberi keyakinan bagi auditor bahwa semua transaksi telah dicatat dengan benar dan diposting dengan benar.

4. Prosedur analitis

Prosedur analitis dilaksanakan untuk mengembangkan ekspektasi untuk menyimpulkan bahwa saldo akhir akun tertentu klien terlihat layak.

5. Pengujian perincian saldo

Berfokus pada saldo akhir buku besar untuk akun neraca maupun laporan laba-rugi.

Standar pekerjaan lapangan sangat terkait dengan kegiatan utama dari audit. Ketiga standar lapangan ini merupakan konsep dasar dari proses audit (Messier, 2005). Dalam bagian pertama standar ini menjelaskan bahwa seorang

auditor memerlukan perencanaan yang tepat. Kegiatan audit memiliki tujuan audit yang efisien dan efektif diperlukan perencanaan penugasan audit. Bagian kedua mengenai pemahaman audit mengenai pemahaman atas sistem pengendalian klien. Section 404 mensyaratkan bahwa auditor menegaskan dan menerbitkan laporan penilaian manajemen terhadap pengendalian atas pelaporan keuangan untuk menyatakan pendapat mengenai pengendalian ini, auditor harus memahami dan melakukan pengujian atas pengendalian untuk semua saldo akun, kelas transaksi, dan pengungkapan yang signifikan, serta asersi terkait dalam laporan keuangan (Arens *et al.*, 2006).

Bagian terakhir dalam standar pekerjaan lapangan mensyaratkan bahwa auditor memerlukan pengumpulan bukti yang cukup. Banyak pekerjaan auditor sangat terkait pencarian dan analisis barang bukti yang berguna untuk mengevaluasi dan membantu dalam penilaian terhadap reliabilitas laporan keuangan. Dalam penugasan audit, seorang akuntan menghadapi dilema etis yaitu ketika auditor harus memutuskan apakah akan berkonfrontasi dengan atasan yang telah menyatakan lebih saji pendapatan departemennya secara material agar dapat menerima bonus lebih besar merupakan suatu dilema etis (Arens *et al.*, 2006).

Walau seorang auditor ini sudah memiliki standar lapangan kerja yang perlu ditaati, namun pada kenyataannya dilema etik akan datang karena adanya berbagai tekanan dan desakan tertentu. Banyaknya tekanan dalam pekerjaan audit dapat membuat auditor menghadapi tekanan ketaatan. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan ekspektasi yang dihadapi oleh auditor di dalam pekerjaan auditnya. Yaitu perbedaan antara keinginan klien yang ingin mendapatkan opini

wajar tanpa pengecualian dan keinginan auditor yang harus bertindak sesuai dengan bukti audit yang telah didapatkannya (Seni, 2012).

Standar pekerjaan lapangan ketiga menyebutkan beberapa prosedur audit yang harus dilaksanakan oleh auditor dalam mengumpulkan berbagai tipe bukti audit. Prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Prosedur audit yang disebutkan dalam standart tersebut meliputi (Mulyadi, 2002) :

1. Inspeksi

Inspeksi merupakan pemeriksaan secara rinci terhadap dokumen atau kondisi fisik sesuatu. Prosedur audit ini banyak dilakukan oleh auditor. Dengan melakukan inspeksi terhadap sebuah dokumen, auditor akan dapat menentukan keaslian dokumen tersebut.

2. Pengamatan

Pengamatan merupakan prosedur audit yang digunakan oleh auditor untuk melihat atau menyaksikan pelaksanaan suatu kegiatan. Objek yang diamati auditor adalah karyawan, prosedur, dan proses.

3. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan merupakan prosedur audit yang dilakukan dengan meminta keterangan secara lisan. Bukti audit yang dihasilkan dari prosedur ini adalah bukti lisan dan bukti dokumenter.

4. Konfirmasi

Konfirmasi merupakan bentuk penyelidikan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari pihak ketiga yang bebas.

Generally Accepted Audit Standards (GAAS) yang merupakan standar audit baku merinci prosedur audit sebagai berikut (Cushing and Loebbecke in AAA, 1986) dalam Elen *et al.*, (2001):

1. Kegiatan pendahuluan (*Pre-engagement Activities*) terdiri dari :

- 1.1 Menerima atau menolak klien baru
- 1.2 Membuat jangka waktu perjanjian
- 1.3 Menetapkan staf audit

2. Aktivitas perencanaan (*Planning activities*), terdiri dari 4 langkah, yaitu :

2.1 Pemahaman tentang bisnis klien, dalam langkah ini auditor harus melakukan:

- 2.1.1 Persiapan evaluasi analitik
- 2.1.2 Menaksir resiko

2.2 Penaksiran atas materialitas

2.3 Mengevaluasi akuntansi pengendalian intern, dilakukan melalui 2 tahap yaitu :

- 2.3.1 Tahap awal
- 2.3.2 Tahap pelengkap

2.4 Mengembangkan perencanaan audit secara menyeluruh :

- 2.4.1 Menjelaskan kepercayaan yang optimal terhadap pengendalian intern
- 2.4.2 Merancang prosedur *compliance test*

2.4.3 Merancang prosedur substantif

2.4.4 Pencatatan program audit

3. Kegiatan pengujian kepatuhan, dilakukan melalui 2 langkah, yaitu:

3.1 Melakukan pengujian

3.2 Melakukan evaluasi akhir terhadap pengendalian intern, dengan cara :

3.2.1 Melakukan evaluasi

3.2.2 Modifikasi rencana audit

4. Kegiatan pengujian substantif, dilakukan dengan 5 langkah yaitu :

4.1 Melakukan pengujian substantif dari transaksi

4.2 Melakukan prosedur pemeriksaan analitik

4.3 Memeriksa secara detil terhadap pengujian atas saldo

4.4 Prosedur pemeriksaan *post balance sheets*

4.5 Memeriksa hasil dari prosedur substantif, dengan cara :

4.5.1 Penemuan agregatif

4.5.2 Melakukan evaluasi

4.5.3 Modifikasi perencanaan audit

4.6 Auditor harus memberikan penjelasan kepada;

4.6.1 Manajemen

4.6.2 Pengacara

4.6.3 Lainnya

5. Kegiatan merancang opini dan laporan, dilakukan melalui 4 langkah, yaitu:

5.1 Mengevaluasi laporan keuangan

5.2 Mengevaluasi hasil audit

5.3 Perumusan opini

5.4 Draft dan menerbitkan laporan

6. Kegiatan berkelanjutan, dilakukan melalui 6 langkah, yaitu :

6.1 Mengadakan pengawasan terhadap pengujian

6.2 Evaluasi pekerjaan asisten

6.3 Mempertimbangkan kelayakan hubungan dengan klien

6.4 Melakukan komunikasi khusus yang diperlukan, mengenai hal berikut :

6.4.1 Kelemahan yang material dalam pengendalian intern

6.4.2 Kesalahan yang bersifat material

6.4.3 Kegiatan ilegal oleh klien

6.5 Melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten tentang masalah masalah khusus

6.6 Merancang dokumen kerja, memutuskan dan menyimpulkan dalam kertas kerja yang tepat

5. Penganggaran Partisipatif dan *Budgetary Slack*

Dalam proses penyusunan anggaran, pembuatan anggaran keterlibatan (partisipasi) berbagai pihak dalam membuat keputusan dapat terjadi. Dengan menyusun anggaran secara partisipatif diharapkan kinerja para manajer dibawahnya akan meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka Karyawan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan, dan karyawan juga memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Milani, 1975 dalam Edfan, 2002).

Disimak dari penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa penganggaran secara partisipatif akan memberikan kepuasan bagi setiap lapisan manajemen karena adanya keterlibatan semua pihak dalam penyusunannya. Sebagaimana dinyatakan oleh Antony dan Govindarajan (2005), berbagai hasil penelitian tentang penganggaran partisipatif terhadap perilaku dan kinerja manajemen, menunjukkan bahwa penganggaran partisipatif memiliki pengaruh positif terhadap motivasi manajerial dengan alasan :

- a. Adanya kecenderungan yang lebih besar dari bawahan untuk menerima target anggaran bila mereka beranggapan mereka turut serta dalam menetapkan anggaran dibandingkan jika anggaran tersebut hanya ditetapkan sepihak.
- b. Penganggaran partisipatif dapat menghasilkan pertukaran informasi yang efektif. Jumlah anggaran yang disetujui mendekati yang sebenarnya, karena penyusunan anggaran memiliki keahlian dan pengetahuan langsung atas lingkup unit organisasi.
- c. Penyusunan anggaran akan memperoleh pemahaman yang lebih jelas atas pekerjaan mereka melalui hubungan dengan atasan mereka selama proses *review* dan persetujuan anggaran.

Walau begitu, dalam penyusunan anggaran secara partisipatif juga memiliki kelemahan-kelemahan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Hansen *et al.*, (1997) bahwa penganggaran partisipatif memiliki tiga masalah potensial :

- a. Penetapan standar yang terlalu tinggi atau terlalu rendah
- b. Memasukkan slack dalam anggaran

c. Partisipasi semu

Dari kelemahan-kelemahan diatas, salah satunya adalah kemungkinan terjadinya *slack* (kesenjangan) dalam anggaran. *Slack* secara umum dapat diartikan sebagai sumber daya dan pengupayaan aktivitas yang tidak dapat dijustifikasi dengan mudah dalam bentuk kontribusinya pada tujuan organisasi (March, 1988) dalam Delli dan Ertambang (2012).

Budgetary slack adalah perbedaan jumlah anggaran yang diajukan oleh bawahan dengan jumlah estimasi yang terbaik dari organisasi (Anthony dan Govindrajan, 2005). Keterlibatan para manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran dan adanya pengukuran kinerja manajer tingkat bawah dalam pencapaian target anggaran menimbulkan dampak terjadinya kesenjangan anggaran (*budgetary slack*). *Budgetary slack* juga merupakan tindakan bawahan yang mengecilkan kapasitas produktifnya ketika bawahan diberi kesempatan untuk menentukan standar kinerjanya. Para peneliti akuntansi menemukan bahwa tingkat *budgetary slack* dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah besarnya partisipasi bawahan dalam penyusunan anggaran (Yuwono, 1999 dalam Dina *et al.*, 2009)

Kesenjangan anggaran terjadi saat manajer tingkat bawah tidak melaporkan informasi sebenarnya dalam proses penyusunan anggaran. Penelitian Young (1985) dalam (Edfan Darlis, 2002) beranggapan bahwa bawahan tidak melaporkan informasinya kepada atasan untuk membantu proses penyusunan anggaran. Atasan memberikan wewenang kepada bawahan dengan harapan agar bawahan melakukan usaha yang terbaik bagi organisasi. Namun, sering keinginan

atasan tidak sama dengan bawahan sehingga menimbulkan konflik diantara mereka (Luthans, 1998) dalam (Edfan Darlis, 2002). Hal ini dapat terjadi misalnya, jika melakukan kebijakan pemberian *rewards* perusahaan kepada bawahan didasarkan pada pencapaian anggaran. Bawahan cenderung memberikan informasi yang bias agar anggaran mudah dicapai dan dapat memberikan *rewards* berdasarkan pencapaian anggaran, sehingga hubungan antara partisipasi dan senjangan anggaran menjadi positif, yaitu, semakin tinggi partisipasi anggaran maka keinginan bawahan untuk melakukan senjangan anggaran akan semakin rendah. Bawahan memakai peluang ini untuk menciptakan senjangan anggaran.

Penelitian lain yang menunjukkan penyebab senjangan anggaran sebagai akibat dari laporan anggaran yang bias karena adanya partisipasi bawahan di dalam penyusunan anggaran adalah penelitian yang dilakukan Onsi (1973) dalam Edfan (2002). Menurut Onsi, sering terjadi bawahan berusaha menciptakan senjangan anggaran. Selama proses penyusunan anggaran kesenjangan anggaran terjadi dengan cara memasukkan informasi yang bias terhadap kondisi operasional organisasi di masa mendatang. Kesenjangan anggaran ini akan mendorong target anggaran terlalu rendah yang kurang memberikan motivasi bagi para pelaksana anggaran, serta akan memperlambat pencapaian tujuan perusahaan. Anggaran yang baik adalah anggaran dengan tingkat kesulitan yang menantang namun masih mungkin untuk dicapai, sehingga mampu memotivasi para pelaksana anggaran untuk berprestasi.

6. Gender

Gender adalah konsep hubungan sosial yang membedakan (memisahkan atau memisahkan) fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Dwi dan Suyanto, 2004). Dalam sebuah studi eksplorasi Roxas dan Stoneback (2004) menganalisis respon siswa dari delapan negara yang berbeda, termasuk Kanada dan China, untuk pertanyaan tentang tindakan kemungkinan mereka untuk suatu dilema etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Ukraina siswa laki-laki akuntansi memiliki tingkat etis lebih tinggi daripada mahasiswa akuntansi perempuan; di Cina mahasiswa akuntansi perempuan memiliki tingkat etika yang lebih tinggi daripada rekan-rekan pria mereka. Tidak ada perbedaan yang signifikan ditemukan dengan negara lain: Amerika Serikat, Australia, Filipina, Jerman, Kanada dan Thailand. Hal ini menunjukkan bahwa jenis kelamin berpengaruh pada etika.

Berdasarkan Coate dan Frey (2000) dalam Berliana (2012), terdapat dua pendekatan yang biasa digunakan untuk memberikan pendapat mengenai pengaruh gender terhadap perilaku etis maupun persepsi individu terhadap perilaku tidak etis, yaitu pendekatan struktural dan pendekatan sosialisasi. Pendekatan struktural, menyatakan bahwa perbedaan antara pria dan wanita disebabkan oleh sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Sosialisasi awal dipengaruhi oleh *reward* dan insentif yang

diberikan kepada individu di dalam suatu profesi. Karena sifat dan pekerjaan yang sedang dijalani membentuk perilaku melalui sistem *reward* dan insentif, maka pria dan wanita akan merespon dan mengembangkan nilai etis dan moral secara sama di lingkungan pekerjaan yang sama. Dengan kata lain, pendekatan struktural memprediksi bahwa baik pria maupun wanita di dalam profesi tersebut akan memiliki perilaku etis yang sama.

Berbeda dengan pendekatan struktural, pendekatan sosialisasi gender menyatakan bahwa pria dan wanita membawa seperangkat nilai dan yang berbeda ke dalam suatu lingkungan kerja maupun ke dalam suatu lingkungan belajar. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam pengambilan keputusan. Para pria akan cenderung untuk melanggar aturan yang ada karena mereka menganggap bahwa pencapaian atas prestasi dianggap sebagai bentuk persaingan. Berkebalikan dengan pria yang mementingkan kesuksesan akhir atau *relative performance*, para wanita lebih mementingkan *self-performance*. Wanita akan lebih menitikberatkan pada pelaksanaan tugas dengan baik dan hubungan kerja yang harmonis, sehingga wanita akan lebih patuh terhadap peraturan yang ada dan mereka akan lebih kritis terhadap orang-orang yang melanggar peraturan tersebut.

Banyak studi-studi psikologis menyatakan bahwa wanita lebih bersedia untuk memenuhi wewenang sedangkan pria lebih agresif dan lebih besar kemungkinannya daripada wanita dalam memiliki pengharapan (ekspektasi) untuk sukses (Berliana, 2012). Kebanyakan laki-laki tidak hanya merasa tertuntut untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi berambisi untuk memperoleh pencapaian seperti predikat, jabatan, dan kekuasaan.

Pandangan mengenai gender juga dihubungkan dengan maskulinitas dan feminitas. Sifat-sifat maskulin diidentifikasi sebagai sifat-sifat pria yaitu sifat superioritas, keras serta sifat kuat yang cenderung mempunyai konotasi positif dalam dunia kerja. Sifat-sifat seorang pemimpin sering diidentifikasi sebagai sifat maskulin. Hal ini berkebalikan dengan sifat-sifat feminim.

Beberapa hasil riset membuktikan bahwa pada umumnya suatu organisasi atau instituti dipimpin oleh laki-laki sebab secara psikologis laki-laki dalam menghadapi suatu permasalahan atau konflik mereka akan cenderung mengedepankan sikap dan perilaku lebih rasional daripada wanita. Semua tindakan dan keputusan yang diambil selalu dipertimbangkan secara rasional dan sedikit sekali menggunakan sifat emosional. Dalam menghadapi situasi konflik audit, auditor pria mempunyai sikap dan perilaku yang lebih etis dengan tetap mengedepankan pemikiran-pemikiran yang rasional serta proses pengambilan keputusan melibatkan logika dan pertimbangan etis mereka (Hidayat dan Handayani, 2010).

Dalam kasus populasi orang dewasa, penelitian menunjukkan bahwa perbedaan tidak ada alasan apapun perempuan berbeda dari laki-laki. Namun, penelitian telah secara teratur menunjukkan bahwa akuntan perempuan dan mahasiswa akuntansi perempuan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada laki-laki (Dellaportas *et al.*, 2005) . Tampak bahwa kemampuan penalaran moral dari akuntan perempuan secara fundamental berbeda dari akuntan laki-laki.

Penyebab perbedaan ini tidak diketahui, tetapi Gilligan (1982) dalam Dellaportas *et al.*, (2005) berpendapat bahwa perkembangan sosial laki-laki disorot oleh rasa individualitas, sementara perkembangan sosial perempuan menekankan hubungan antara orang-orang didorong oleh hubungan dan kewajiban kepada orang lain yang dikenal sebagai kepedulian etika. Pengakuan hubungan dan tanggung jawab oleh perempuan lebih menonjol dalam keputusan etis yang mereka buat daripada laki-laki.

7. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan faktor yang semakin penting dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang etika. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki etika yang juga tinggi serta penalaran moral yang tinggi.

Sudibyo (1995) dalam Khomsiyah dan Indriantoro (1997) dalam Widi (2010) menyatakan bahwa pendidikan akuntansi (pendidikan formal) mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku etis akuntan sebab pendidikan tinggi akuntansi tidak saja bertanggung jawab pada pengajaran ilmu pengetahuan bisnis dan akuntansi (transformasi ilmu pengetahuan) semata kepada mahasiswanya, tetapi lebih dari itu bertanggung jawab mendidik mahasiswa agar mempunyai kepribadian (*personality*) yang utuh sebagai manusia. Pendidikan yang semakin tinggi ditempuh oleh mahasiswa akan meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai perilaku etis. Oleh karena itu, integrasi etika profesi dalam kurikulum akan meningkatkan perilaku etis mahasiswa di dunia kerja. Hal senada dikemukakan oleh Hildebeitel dan Jones (1992) dalam Ludigdo (1999) dalam

Widi (2010) melakukan penelitian dengan eksperimen tentang penilaian instruksi etis dalam pendidikan akuntansi. Hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan keputusan etis dipengaruhi oleh pengintegrasian etika ke dalam mata kuliah yang diajarkan.

Menurut Sanjaya (2005), Kemajuan suatu masyarakat dapat dilihat dari perkembangan pendidikannya. Pendidikan adalah suatu usaha atau kegiatan yang dijalankan dengan sengaja, teratur dan berencana dengan maksud mengubah atau mengembangkan perilaku yang diinginkan. Pendidikan merupakan proses yang sangat menentukan untuk perkembangan individu dan perkembangan masyarakat.

Fungsi pendidikan menurut Hamalik (2009) adalah mempersiapkan peserta didik, dimana peserta didik yang pada hakikatnya belum siap dan perlu untuk dipersiapkan dan sedang menyiapkan dirinya sendiri. Hal ini merujuk pada proses yang berlangsung sebelum peserta didik siap untuk melangkah pada kehidupan yang nyata. Menurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2003:50) tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum.

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi persepsi seseorang tentang etika. Seseorang yang berpendidikan tinggi dianggap memiliki etika yang juga tinggi serta penalaran moral yang tinggi (Berliana, 2012). Dengan pendidikan yang diambil seseorang yang lebih tinggi, tentunya akan lebih banyak pengalaman

belajar yang diterima, dan lambat laun akan menciptakan penalaran etika yang lebih baik.

Menurut Kristianto (2007), dalam pengertian yang sempit, pendidikan berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh pengetahuan. Dalam pengertian yang agak luas, pendidikan dapat diartikan sebagai sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku sesuai dengan kebutuhan. Dalam pengertian yang luas dan representatif, pendidikan adalah seluruh tahapan pengembangan kemampuan-kemampuan dan perilaku-perilaku manusia dan juga proses penggunaan hampir seluruh pengalaman kehidupan. Tingkat pendidikan akan mengubah sikap dan cara berpikir ke arah yang lebih baik, dan juga tingkat kesadaran yang tinggi yang akan memberikan kesadaran lebih tinggi mengenai keputusan yang diambil individu.

8. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan dari penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Perbedaan Sensitivitas Etis Mahasiswa Ditinjau dari Disiplin Ilmu Dan Gender, 2005	Darsinah (2005)	Dependen : Sensitivitas Etis Independen: Gender, Disiplin Ilmu, dan Sinisme	Ada perbedaan sensitivitas etis yang signifikan antara mahasiswa Program Studi Akuntansi, Manajemen, dan Pendidikan Akuntansi; Ada perbedaan yang signifikan dalam

				sensitivitas etis antara mahasiswa laki-laki dan perempuan
2	Analisis perbedaan perilaku etis auditor Di KAP dalam etika profesi (studi terhadap peran faktor-faktor individual: <i>locus of Control</i> , lama pengalaman kerja, gender, dan <i>equity Sensitivity</i>)	Putri Nugrahaningsih (2005)	Dependen : perilaku etis auditor Independen : <i>locus of Control</i> , lama pengalaman kerja, gender, dan <i>equity Sensitivity</i>	Ada perbedaan perilaku etis antara auditor <i>locus of control internal</i> dan <i>locus of control eksternal</i> . Ada perbedaan perilaku etis antara auditor senior dan junior. Tak ada perbedaan yang signifikan perilaku etis antara auditor laki-laki dan perempuan.
3.	Pengaruh locus of control, Tingkat pendidikan, pengalaman kerja, dan pertimbangan etis terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit	Renata Zoriafi (2003)	Kognitif : pertimbangan etis Personalitas : <i>locus of control</i> , tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja Dependen : perilaku auditor dalam situasi konflik audit	interaksi antara variabel kognitif (pertimbangan etis) dan variabel personalitas (<i>locus of control</i> , tingkat pendidikan, dan pengalaman kerja) berpengaruh terhadap perilaku auditor dalam situasi konflik audit
4	Perilaku etis mahasiswa dan dosen ditinjau dari faktor individual gender dan <i>locus of control</i>	Sri Hastuti	Dependen : Perilaku etis Independen : <i>Locus of control</i> , gender	Hasilnya terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa antara mahasiswa laki-laki dan perempuan Tidak terdapat perbedaan perilaku etis antara dosen laki-laki dan perempuan Hasilnya terdapat perbedaan perilaku etis antara mahasiswa LOC internal dan

				LOC eksternal
5.	Analisis pengaruh jenis kelamin dan tingkat pendidikan terhadap persepsi etis mahasiswa akuntansi dengan <i>love of money</i> sebagai variabel moderasi	Berliana Normadewi (2012)	Dependen : persepsi etis mahasiswa Independen : tingkat pendidikan, gender variabel moderasi : <i>love of money</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis kelamin tidak mempunyai hubungan dengan <i>love of money</i> mahasiswa akuntansi dan persepsi etis mereka. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap <i>love of money</i> dan persepsi etis mahasiswa akuntansi. Pengaruh
6	Perbedaan penerapan etika profesi akuntan pada perilaku auditor junior dan auditor senior (studi terhadap auditor yang bekerja pada kap dimalang)	Ratna Utami (2009)	Dependen : Penerapan etika profesi akuntansi Independen : auditor senior dan junior	Tidak ada perbedaan perilaku etis antara auditor junior dan senior dilihat dari 8 prinsip etika profesi
7.	Analisis Perbedaan pengetahuan etika profesi akuntan dan penerapan etika profesi akuntan (Studi Empiris pada Mahasiswa akuntansi di Kota padang)	Eka Fauziahhardani (2012)	Dependent : pengetahuan etika dan penerapan etika profesi akuntansi Independent : Gender, Tingkat Pendidikan, dan Disiplin ilmu	Pengetahuan Etika yang dipelajari tidak dapat diterapkan, terdapat perbedaan penerapan etika profesi menurut gender menurut tingkat pendidikan dan menurut disiplin ilmu.
8.	<i>Shaping ethica perceptions: An empirical assessment of</i>	Lopez et al. (2005)	Tingkat pendidikan, kebudayaan intranasional,	Tingkat kebudayaan intranasional, jenis dan berpengaruh pendidikan, kelamin,

	<i>the influence of business education, culture, and demographic factors.</i>		jenis kelamin, persepsi etis	signifikan kelamin secara terhadap persepsi etis. Penelitian ini juga menemukan bahwa perilaku etis cenderung tinggi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi
--	---	--	------------------------------	--

B. Kerangka Konseptual

Etika Profesi Akuntan adalah merupakan suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Dalam etika profesi, sebuah profesi memiliki komitmen moral yang tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk aturan khusus yang menjadi pegangan bagi setiap orang yang mengembangkan profesi yang bersangkutan. Aturan ini merupakan aturan main dalam menjalankan atau mengemban profesi tersebut yang biasanya disebut sebagai kode etik yang harus dipenuhi dan ditaati oleh setiap profesi.

Mahasiswa sebagai calon profesional akuntansi di masa depan, perlu memahami arti penting penerapan etika profesi akuntan ini. Mahasiswa perlu diberi gambaran mengenai pekerjaan seorang profesional akuntan agar mereka mampu berperilaku etis saat mereka bekerja nantinya. Pekerjaan akuntan yang setiap keputusannya perlu mempertimbangkan kepentingan klien dan masyarakat umum tidak pernah lepas dari situasi dilema etis. Dilema etis yang terjadi dalam profesi akuntan dapat terjadi dalam berbagai kasus pekerjaan akuntan seperti

penugasan audit dan penyusunan anggaran partisipatif yang memungkinkan adanya kesenjangan anggaran.

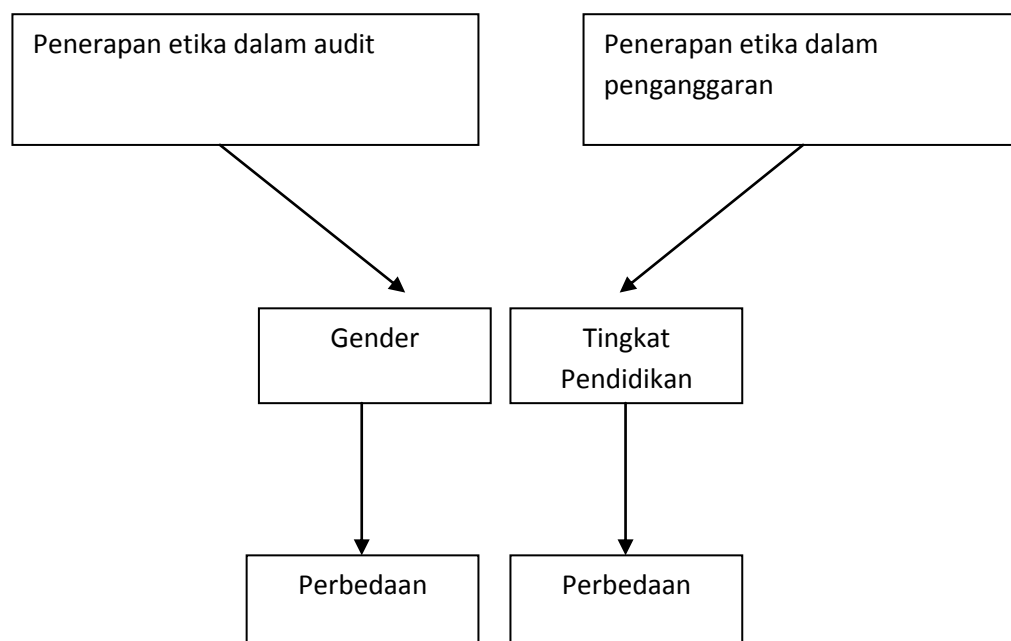
Akuntan merupakan sebuah profesi yang memiliki kode etik yang perlu dipahami oleh setiap akuntan. Mahasiswa sebagai calon akuntan, merupakan sebuah profesi yang hasil pekerjaannya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan, perlu diberi bekal yang cukup mengenai penerapan etika untuk memberi penalaran yang baik saat dihadapkan pada dilema etis. Maka dari itu, penelitian ini mencoba melihat bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi terhadap penerapan prinsip kode etik akuntan yang dikeluarkan oleh IAI.

Perbedaan penerapan etika dapat dilihat dari gender dan tingkat pendidikannya. Dilihat dari sisi gender, seorang mahasiswa akuntansi wanita memiliki pemikiran yang berbeda dengan laki-laki. Seorang wanita memiliki pertimbangan etis yang lebih baik dari pada laki-laki. Sementara mahasiswa laki-laki berpikir lebih mengedepankan hal yang rasional dalam menghadapi suatu masalah. Seorang laki-laki condong lebih ambisius untuk menggapai kesuksesan dan memiliki kemungkinan untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan yang diinginkannya bahkan kadang harus melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku. Sementara wanita walaupun juga memiliki sikap ambisius, namun dalam tindakannya akan lebih mengedepankan pemikiran untuk tidak melanggar etika yang ada.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, seorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi tentunya memiliki pemahaman yang lebih baik dalam penerapan

etika. Seorang mahasiswa S1 menerima mata kuliah lebih banyak sekitar 149 SKS, tentunya akan lebih baik dalam teori akuntansi yang dipelajarinya. Namun dalam etika berbeda, seorang yang berpendidikan yang lebih tinggi belum tentu memiliki sensitivitas etika yang lebih baik. Karena dalam beretika, pendidikan yang lebih tinggi tidak bisa menjamin seorang akan mampu berperilaku etis dalam bekerja. Kurikulum yang ada sekarang di perguruan tinggi lebih cenderung berfokus untuk mempersiapkan lulusan agar memiliki kemampuan teknis akuntansi, yang bersifat kuantitatif, dan kurang memberikan perhatian pada bagaimana perilaku etis diterapkan dalam situasi pekerjaan yang akan dihadapi oleh lulusan akuntansi. Maka dari itu, pendidikan akuntansi sudah seharusnya mengintegrasikan nilai etika dalam kurikulumnya.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



C. Hipotesis

1. Penerapan etika profesi dan Gender

Gender atau jenis kelamin adalah interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin dan hubungan antara laki-laki dan perempuan (Ferijani dan Mareta, 2003 dalam Metta Suliani, 2010). Perbedaan jenis kelamin mungkin membentuk persepsi yang berbeda sehingga mempengaruhi sikap yang berbeda pula antara laki-laki dan perempuan dalam menanggapi etika profesi akuntansi.

Bets *et al.*, (1989) dalam Ameen *et al.*, (1996) menyajikan dua pendekatan alternatif mengenai perbedaan gender dalam menentukan kesungguhan untuk berperilaku tidak etis dalam lingkungan bisnis, yaitu pendekatan sosialisme gender (*gender socialization approach*) dan pendekatan struktural (*struktural approach*). Pendekatan sosialisasi menyatakan bahwa pria dan wanita membawa nilai dan sifat berbeda dalam dunia kerja. Perbedaan nilai dan sifat berdasarkan gender ini akan mempengaruhi pria dan wanita dalam membuat keputusan dan praktik, pria akan bersaing untuk mencapai kesuksesan dan lebih cenderung untuk melanggar aturan-aturan, karena mereka memandang prestasi sebagai persaingan.

Pendekatan struktural menyatakan bahwa perbedaan wanita dan pria disebabkan sosialisasi awal terhadap pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan peran lainnya. Namun demikian, sosialisasi awal dipengaruhi oleh imbalan (*rewards*) dan biaya yang berhubungan dengan peran-peran dalam pekerjaan. Sifat dari pekerjaan yang dijalani membentuk perilaku melalui struktur imbalan (*rewards*).

Penelitian Rueger dan King (1992), yang dilakukan berdasarkan pengamatan bahwa wanita lebih banyak memegang peranan penting dalam

manajemen perusahaan, menunjukkan hasil bahwa gender merupakan faktor signifikan dalam penentuan *ethical conduct* dan wanita lebih etis daripada pria.

Sementara itu, Cohen *et al.*, (1998) dalam Darsinah (2005) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji perbedaan gender dan disiplin ilmu dalam evaluasi etis, 60 *ethical intention*, dan orientasi etis. Sampel penelitian mereka adalah mahasiswa *undergraduate* dari disiplin ilmu akuntansi, bisnis, dan *liberal art* dari empat universitas di *Notharm United States*. Hasilnya menunjukkan bahwa mahasiswa wanita memandang tindakan dipertanyakan (*questionable actions*) sebagai tindakan kurang etis dan mengindikasikan niat yang lebih rendah untuk melaksanakan tindakan tersebut daripada mahasiswa pria.

Kanzanchi (1995) dalam Darsinah (2005) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah perbedaan gender mempunyai dampak pada kemampuan pembuat keputusan prospektif dalam mengidentifikasi perilaku tidak etis dalam desain, pengembangan, implementasi, dan penggunaan teknologi informasi. Hasilnya ditemukan bahwa wanita lebih mampu untuk mengakui tindakan tidak etis yang dideskripsikan dalam skenario sistem informasi daripada pria, keberadaan perbedaan yang secara statistik signifikan tersebut berbeda-beda tergantung pada sifat dari dilema etisnya.

Dari penelitian sebelumnya, menyatakan bahwa wanita lebih mampu melihat suatu tindakan yang tidak etis. Akan tetapi, Sikula dan Costa (1994) serta Schoderbeck dan Deshpande (1996) dalam Tittany (2009) menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara gender dengan etika. Penelitian Chan dan Leung (2006) dalam Tittany (2009) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan antara

gender terhadap sensitivitas etis mahasiswa. Hal ini menunjukkan terjadi ketidakkonsistenan penelitian pada variabel gender.

Peneliti ingin mengetahui apakah gender mempengaruhi pembuatan keputusan etis karena terdapat ketidakkonsistensi penelitian dari penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti mengenai pengaruh gender. Maka peneliti ingin mengetahui dan membandingkan apakah penerapan etika profesi mahasiswa akuntansi di Kota Padang untuk membuat keputusan etis, terdapat perbedaan atau tidak. Oleh karena itu dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Terdapat perbedaan penerapan etika profesi akuntan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan di Kota Padang

2. Penerapan etika profesi dan tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang individu akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah (Maria Asti, 2005). Berdasarkan pemahaman ini, seorang mahasiswa yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mampu mengambil keputusan yang lebih etis dari pada mahasiswa dengan tingkat pendidikan lebih rendah.

Kurikulum yang disajikan untuk mahasiswa dari jenjang D3 dan S1 memiliki perbedaan. Menurut buku pedoman penyelenggaraan pendidikan FE UNPAD (2012), lulusan D3 akuntansi ditujukan untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki kompetensi sebagai tenaga ahli madya akuntansi. Sementara itu,

bagi mahasiswa S1 ditujukan untuk menjadi sarjana akuntansi profesional dengan memiliki pengetahuan, keahlian, sikap profesional dan etika yang cukup di bidang Akuntansi Keuangan, Akuntansi Manajemen, Sistem Informasi Akuntansi, Auditing, Akuntansi Sektor Publik dan Perpajakan. Perbedaan kompetensi dasar ini tentunya akan berimbas pada perbedaan sensitivitas etisnya.

Penelitian Ponemon dan Gabhart (1993) mengenai akuntan dengan penalaran moral yang tinggi cenderung melakukan perilaku yang lebih etis dibandingkan dengan akuntan dengan penalaran moral yang lebih rendah. Hasil penelitiannya menemukan bahwa auditor Amerika Serikat dan Kanada dengan penalaran moral yang lebih rendah sering melakukan prosedur audit secara tidak lengkap. Penalaran moral akan terbentuk dari sistem pendidikan. Kurikulum yang mengintegrasikan pendidikan etika profesi akan meningkatkan penalaran moral mahasiswa.

Dellaportas (2006) menemukan bahwa pendidikan etika memiliki dampak positif yang signifikan terhadap etika mahasiswa akuntansi. Hal ini berarti mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan cenderung berperilaku lebih etis dibandingkan mahasiswa dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah.

Lopez *et al.*, (2005) menguji efek dari tingkat pendidikan dalam sekolah bisnis dan faktor individu lain, seperti kebudayaan intra-nasional, spesialisasi dalam pendidikan, dan jenis kelamin pada persepsi etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan, kebudayaan intra-nasional, dan jenis kelamin berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi etis. Selanjutnya,

mereka menemukan bahwa perilaku etis cenderung tinggi pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Browning dan Zabriskie (1983), Jones dan Gautschi (1988) dan Lane et al. (1988) dalam Renata (2005) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin etis seseorang. Hal ini berbeda dengan penelitian Dubinsky dan Ingram (1984); Kidwell et al. (1987) serta Serwinek (1992) dalam Renata (2005) yang memperlihatkan tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan perilaku etis.

Browning dan Zabriskie (1983) dalam Ford dan Richardson (1994) dalam Widi (2010) menemukan bahwa manajer pembelian dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi memandang hadiah sebagai hal yang tidak etis dibanding manajer pembelian dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah. Demikian pula, seorang auditor yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan cenderung memiliki pola pemikiran, sikap dan perilaku etis yang lebih tinggi pula sebab mereka akan selalu menjaga dan mempertahankan kode etik profesi mereka dalam situasi apapun. termasuk situasi konflik.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka rumusan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Terdapat perbedaan penerapan etika profesi akuntan antara mahasiswa D3 dan S1

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang dikumpulkan, maka dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab hipotesis penelitian. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Hasil pengujian dengan *Independent Sample T-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan etika profesi akuntan antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Dilihat dari nilai *mean* kedua kelompok tersebut diketahui bahwa nilai *mean* mahasiswa laki-laki yaitu 3,7102 lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *mean* mahasiswa perempuan sebesar 3,2713. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan etika profesi akuntan mahasiswa perempuan lebih baik daripada mahasiswa laki-laki pada kondisi kerja yang mengandung dilema etis.
- b. Hasil pengujian dengan *Independent Sample T-test* menyatakan bahwa terdapat perbedaan antara penerapan etik profesi akuntan antara mahasiswa S1 Akuntansi dan D3 Akuntansi. Dilihat dari nilai *mean* kedua kelompok tersebut diketahui bahwa nilai *mean* mahasiswa S1 Akuntansi yaitu 3,2073 lebih rendah dibandingkan dengan nilai *mean* mahasiswa D3 Akuntansi sebesar 4,0673. Sehingga disimpulkan bahwa penerapan etika profesi akuntan lebih baik terdapat pada mahasiswa S1 Akuntansi daripada mahasiswa D3 Akuntansi pada kondisi kerja yang mengandung dilema etis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahasiswa Akuntansi hendaknya terus meningkatkan wawasan dan pengetahuannya mengenai kode etik akuntan, tidak hanya terbatas pada pengetahuan yang telah diperoleh lewat perkuliahan di kampus. Hal ini berguna untuk menerapkannya dalam dunia kerja yang akan dihadapinya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam penyusunan kurikulum pendidikan akuntansi dalam upaya untuk meningkatkan kualitasnya. Setidaknya, hasil penelitian ini akan dapat menjadi indikator mengenai bagaimana calon-calon akuntan tersebut akan berperilaku profesional di masa yang akan datang.

C. Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa kelemahan yang membatasi kesempurnaan hasil penelitian ini. Untuk itu keterbatasan ini semoga dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

1. Objek penelitian hanya mencakup pada mahasiswa akuntansi saja dan tidak melihat perbedaan penerapan etika profesional akuntan.
2. Lingkup penelitian ini hanya berada di kota Padang sehingga akan lebih baik apabila diperluas ke Kota lainnya.
3. Variabel tingkat pendidikan hanya mencakup D3 dan S1 karena pendidikan Magister Akuntansi (S2) jumlah mahasiswanya terbatas dan hanya ada satu Universitas yang menyelenggarakannya.

4. Situasi dilema etika yang diteliti dalam riset ini baru pada 2 bidang, yakni penugasan audit dan penyusunan anggaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas bidang penugasan yang mengandung dilema etika, seperti perpajakan dan penyusunan laporan keuangan yang memungkinkan terjadinya manajemen laba.